

**MANAJEMEN PENYIDIKAN DARI PENYIDIK POLRI  
KE JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PENYELESAIAN BERKAS PERKARA  
(Studi Kasus Pengadaan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kota Surabaya)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis manajemen penyidikan dalam penyelesaian berkas perkara dari penyidik ke jaksa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang menguraikan preposisi hukum atau kejadian non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penyidikan dalam penyelesaian berkas perkara yang Penyidik Polri ke Jaksa dimulai dengan proses penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana berdasarkan laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat, yang kemudian dari hasil penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan guna menemukan adanya peristiwa pidana. Hasil dari penyidikan tersebut diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan kelayakan Berkas Perkara dapat dilanjutkan pada proses pra penuntutan guna pembuatan dakwaan terhadap tersangka. Apabila Berkas Perkara dinilai tidak layak untuk dilanjutkan berdasarkan analisa Jaksa Penuntut Umum, maka Berkas Perkara dikembalikan ke penyidik untuk dipenuhi. Dalam proses penyidikan tersebut, yang menjadi tolok ukur manajemen penyidikan dalam penanganan tindak pidana adalah KUHAP. setiap penyelesaian berkas perkara dari Penyidik Polri ke Jaksa, acapkali terkendala dengan adanya sikap egosentris setiap instansi Polri dan Jaksa tersebut sehingga memperlambat terpenuhinya unsur delik yang hendak disangkakan kepada Tersangka atau guna menemukan adanya peristiwa tindak pidana. Sikap egosentris yang dimaksud adalah kewenangan secara internal yang didasarkan pada manajemen penyidikan dalam menentukan ada atau tidak adanya peristiwa pidana yang dinilai dari kelengkapan Berkas Perkara yang diselesaikan oleh penyidik Polri. Kewenangan internal itu sendiri dari manajemen penyidik Polri hingga Jaksa Penuntut Umum, yang semuanya memiliki manajemen secara internal.

Kata kunci: manajemen, penyidikan, Polri, Jaksa

**MANAGEMENT INVESTIGATION FROM  
INVESTIGATORS POLICE TO OF PUBLIC PROSECUTORS  
IN THE RESOLUTION OF DOCKET  
(Case Study Of Procurement Identification card Electric In Surabaya  
Department Of Population And Civil Registry)**

**ABSTRACT**

Research aim is to analyze management investigation in solving docket of investigators to prosecutor. This research uses the approach empirical juridical analysis. Analysis techniques data in this research using descriptive outlining analysis preposition law or scene non-law. The result showed that the management of investigation in solving docket that investigators to the police began with the investigation for the alleged crimes based on the report or complaints that are submitted by by the community, the investigation into the enhanced as investigation to find any criminal events. Descriptive outlining analysis preposition law or scene non-law. The result showed that the management of investigation in solving docket that investigators to the police began with the investigation for the alleged crimes based on the report or complaints that are submitted by by the community, the investigation into the enhanced as investigation to find any criminal events. The result of investigation is submitted to public prosecutors to determined eligibility docket can proceed to the process pre prosecution to making the indictment of suspects. When docket were deemed unsuitable to continue based on an analysis of public prosecutors, then docket returned to investigators to be fulfilled. In the process of the investigation, the benchmark manajemen investigation in handling crime is KUHAP. Solving docket of investigators to the police, more often hampered by the police discretion every agency and the prosecutor the fulfilment of slowing delik who want to suspect or find softness the fallen crimes. Discretion that one should authority internally based on management investigation in determining is the fallen criminal which appraised of completeness docket that was settled by police investigators. The authority internal itself was of manajemen police investigators to state prosecutor, all of which have management internally.

Keywords: management, investigation, police, prosecutor